

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Penelitian Terdahulu

Nurdahlia et al., (2023) meneliti terkait bagaimana efektifitas sistem pengendalian internal piutang dalam menghindari resiko kerugian piutang tak tertagih di PT. ABC. Dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan study dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya di PT. ABC sistem pengendalian internal piutang sudah sesuai dengan sistem pengendalian internal menurut COSO, namun sistem pengendalian internal piutang PT. ABC belum efektif. Terdapat 2 faktor kendala yang ditemukan yaitu internal dan eksternal, factor eksternal disebabkan karena adanya costumer yang sengaja memperlambat pembayaran tagihan, costumer yang susah dihubungi dan juga customer yang mengalami penurunan penjualan sehingga tidak dapat membayar hutangnya.

Suhermansah & Info, (2025) meneliti terkait bagaimana menganalisis tentang sistem pengendalian internal piutang pada PT.CANNONex Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara observative, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari Perusahaan yang

diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal piutang di PT.CANNONex Indonesia masih belum optimal. Prosedur penagihan yang tidak terstandarisasi, kurangnya pemantauan terhadap piutang macet serta kendala dalam informasi dan komunikasi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan jumlah piutang macet, dan keterlambatan pembayaran.

Penelitian oleh Endang et al., (2022) terkait implementasi pembiayaan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung ialah ada Sebagian kelurahan yang para debitur tidak membayar kewajibannya, dan terdapat beberapa wilayah atau kelurahan yang sebagian usahanya tidak berjualan atau tidak bergerak lagi, juga UMKM yang tidak bertempat tinggal di wilayah atau kelurahannya lagi, kemudian usaha tidak bisa produktif Kembali karena para pelaku UMKM sudah wafat atau pindah tangan. Dengan adanya factor tersebut pihak koperasi harus lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaku UMKM penerima pinjaman dana bergulir yang masuk dalam kategori macet. Dengan cara mengerahkan semua aparat pelaksanaan yang ada untuk ikut serta di dalam kegiatan turun lapangan untuk monitoring dan evaluasi setelah dana bergulir disalurkan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Khairudin et al., (2022) terkait Analisis Strategi Pengelolaan Piutang Dalam Meminimalisir Piutang Macet Pada PT.PLN (Persero) UP Tanjung Karang. Yang menunjukkan bahwa pengelolaan piutang penting bagi entitas karena dapat berdampak positif pada efektifitas arus kas. Penelitian menunjukkan bahwa entitas telah memiliki strategi pengelolaan piutang yang baik, yang ditunjukkan dengan adanya standar kredit dan persyaratan kredit yang jelas dan berlaku secara nasional, adanya penerapan kebijakan pengumpulan piutang yang berdampak positif pada rasio pengukuran piutang yang baik. Kondisi ini tentunya harus dipertahankan/ditingkatkan dengan cara (1) meningkatkan komitmen seluruh pegawai untuk selalu melaksanakan pekerjaan sesuai SOP yang ada; (2) melakukan kegiatan grebek tunggakan yang berkolaborasi dengan seluruh pegawai terkait.

Penelitian Akuntansi et al., (2025) terkait Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Piutang pada PT Samudra Puranabile Abadi Bitung, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi cara meminimalkan resiko piutang tak tertagih, menggunakan teori COSO. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian piutang telah berfungsi secara efektif di seluruh komponen COSO, berkontribusi pada kelancaran arus kas dan manajemen risiko kredit dengan sistem pengawasan internal.

Penelitian Sarindat et al., (2025) terkait Implementasi Kerangka Kerja COSO dalam Pengendalian Piutang di Hotel Sintesa Penisula Manado, studi ini meneliti terkait penerapan lima kerangka COSO dalam spi piutang di hotel sintesa penisula manado dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian inimenunjukkan bahwa implementasi belum optimal, dengan kelemahan dalam penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, yang menyebabkan tunggakan tinggi dan penurunan likuiditas. Studi ini menyarankan perbaikan SOP dan sistem informasi untuk memperkuat pengendalian internal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sistem Pengendalian Internal

Commitee of Sponosring Organizations of the Tredway Commisi on (COSO) mendefinisikan sistem pengendalian internal adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil dalam Perusahaan yang dirancang untuk memberikan kepastian yang memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan. Menurut Nababan & Muktiadji, (2022) pengendalian internal merupakan sistem yang diperlukan untuk mengawal kegiatan sebuah Perusahaan, dimana Perusahaan dapat meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam menilai hasil kerja

perusahaan, sistem pengendalian internal juga dapat menghasilkan laporan yang dikehendaki manajemen, dapat mengamankan sumber-sumber dari pemborosan, kecurangan, dan ketidakefisienan dan dapat dilaksanakannya kebijakan perusahaan serta meningkatkan efisiensi.

Menurut Mulyadi dalam bukunya "Sistem Akuntansi" (2001:163-164), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.2.2 Piutang dan Manajemen Piutang

Piutang merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi yang berhubungan dengan penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu Perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan jasa yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Didukung dengan pernyataan Javany et al., (2024) piutang merupakan tagihan yang akan diterima oleh Perusahaan, pada umumnya tagihan yang diterima perusahaan berbentuk kas dari pihak lain, tagihan tersebut dapat timbul karena beberapa hal, yaitu dari penyerahan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit yang dapat berupa piutang usaha atau bahkan piutang wesel.

Piutang memiliki peranan besar bagi perusahaan karena merupakan sumber daya yang terus berputar dalam kegiatan operasional perusahaan.

Dalam penerapan kebijakan kredit banyak menimbulkan sejumlah resiko yang harus dihadapi oleh perusahaan. seperti yang dikatakan oleh Wahyuni, (2015) di penelitian Haq & Handayani, (2024) Banyak Perusahaan menghadapi kesulitan dalam mengelola resiko terutama terkait dengan keterlambatan pembayaran pelanggan melewati batas waktu yang telah ditentukan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan piutang menjadi tidak lancar.

2.2.3 Teori Stakeholder

Pada tahun 1984, studi mengenai Stakeholder pertama kali dikemukakan oleh Freeman tentang "*Strategic Management: A Stakeholder*" yang diartikan bahwa Stakeholder sebagai seseorang atau sekelompok orang yang saling berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) proses perusahaan untuk mencapai tujuan terhadap perusahaannya.

Teori stakeholder dapat menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) seperti UMK penerima dana, manajemen PT Semen Indonesia,

pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan/auditor yang menilai kinerja BUMN.

2.2.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk memperbaiki kinerja keuangan. Pelaksanaan CSR dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat memberikan pengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui daya saing industri. Melalui CSR, Perusahaan dapat meningkatkan reputasi, loyalitas pelanggan, dan akses ke modal, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas jangka Panjang. Hal ini juga didukung oleh bukti regresi yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara pelaksanaan CSR dan kinerja keuangan Perusahaan, Dimana Perusahaan yang menganggap CSR sebagai investasi strategis cenderung mengalami peningkatan performa finansial secara berkelanjutan (Zhang & Su, 2023)

2.2.5 Tanggung Jawab Social dan Lingkungan (TJSL)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia didefinisikan dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) sebagai komitmen Perseroan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan dengan dampak positif bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan TJSL, seperti yang dinyatakan dalam pasal 74 UUPT, adalah untuk membangun hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, norma, dan budaya lokal (Irawan, 2024).

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN (Program TJSL BUMN) adalah tindakan kewajiban organisasi untuk kemajuan praktis dengan memberikan keuntungan finansial, iklim sosial, dan administrasi yang sah dengan standart yang terkoordinasi, signifikan, dan bertanggung jawab (Zahrina Ghaisany Pulungan & Muhammad Yafiz, 2022).

2.2.6 Teori Risiko Kredit

Resiko kredit menjelaskan bahwa resiko kredit muncul ketika pihak yang menerima dana (debitur) tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini merupakan salah satu resiko utama dalam aktivitas pembiayaan dan pendanaan. Salah satunya penilaian dari umur piutang.

Tabel 2. 1 Klasifikasi Piutang Berdasarkan Umur Piutang

| Kategori | Hari Keterlambatan |
|---------------|--------------------|
| Lancar | 0-30 Hari |
| Kurang Lancar | 31-90 Hari |
| Diragukan | 91-180 Hari |
| Macet | >180 Hari |

2.2.7 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO), komponen ini di dapat dari cara manajemen dalam menjalankan bisnisnya. Komponen ini mengembangkan kerangka sistem pengendalian internal yang terdiri dari lima komponen yaitu:

a) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan yang dilakukan, kebijakan dan prosedur yang dijalankan mencerminkan sikap keseluruhan bagi top manajemen, direktur, dan komisaris, serta pemilik satuan usaha.

Beberapa prinsip menurut COSO yang berpengaruh terhadap komponen lingkungan pengendalian diantaranya, Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika, memiliki

struktur organisasi, melaksanakan tanggung jawab pengawasan, serta memiliki SOP terkait pengelolaan piutang.

b) Pengendalian Resiko

Tindakan yang dilakukan sebagai upaya manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan. Prinsip pengendalian resiko yang relevan di antaranya, identifikasi rutin pada piutang macet, menentukan tujuan yang sesuai, serta menentukan strategi dalam memitigasi resiko piutang macet.

c) Aktivitas Pengendalian

Kebijakan prosedur yang dirancang untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diambil telah tepat dalam menangani risiko guna mencapai tujuan suatu entitas. Prinsip COSO komponen aktivitas pengendalian di antaranya, menentukan prosedur otorisasi penyaluran, mengembangkan sistem pengendalian umum.

d) Informasi dan Komunikasi

Menurut IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yaitu Melakukan identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam bentuk bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawabnya. Prinsip yang berpengaruh diantaranya,

komunikasi antara staf/ internal yang efektif, komunikasi eksternal dengan pihak debitur secara efektif, serta relevansi dalam menggunakan informasi.

e) Pemantauan

Aktivitas ini berhubungan dengan pengendalian unternal secara berkelanjutan oleh pihak manajemen sebagai penentuan bahwa pengendalian tersebut telah berlangsung seperti yang diharapkan. Prinsip yang berpengaruh diantaranya, evaluasi terhadap perbaikan kelemahan pengendalian dan melaporkan secara rutin Evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan piutang macet.

